

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam mengatasi permasalahan keberadaan rumah yang tidak layak huni, pemerintah daerah Kota Tangerang melakukan kegiatan rehab rumah tidak layak huni yang menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat, berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa hal tersebut ternyata memperbesar keberhasilan kegiatan tersebut serta hasil yang didapatkan oleh masyarakat juga lebih sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri karena dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan masyarakat selalu terlibat didalamnya meskipun tetap dengan dukungan dari kelompok masyarakat berupa BKM setempat.

Secara garis besar tingkat partisipasi masyarakat dalam keseluruhan tahap kegiatan rehab rumah tidak layak huni di Kelurahan Kedaung Baru dan Kelurahan Batu Ceper Kota Tangerang menurut teori partisipasi Kotus & Sowada (2017) berada di tingkat tertinggi atau *rebellious* dimana masyarakat sudah mau berkoordinasi dan kooperatif bekerja sama dengan *stakeholder* lain dalam hal ini pemerintah daerah dan BKM serta masyarakat juga sudah mampu untuk memutuskan sendiri kebutuhan pekerjaan rehab yang akan dikerjakan. Secara rinci tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan adalah *collaborative* sedangkan pada tahap pelaksanaan adalah *rebellious*.

Kelurahan Batu Ceper tingkat partisipasi di keseluruhan tahap cenderung lebih tinggi dibandingkan Kelurahan Kedaung Baru meskipun sama – sama di tingkat *rebellious*, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan cenderung tidak menurunkan keterlibatan mereka dalam berpartisipasi terutama pada tahap perencanaan dimana mereka cukup aktif memberikan masukan dan mampu mengidentifikasi kebutuhan pekerjaan.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehab rumah tidak layak huni di Kota Tangerang pada saat tahap perencanaan adalah bentuk pengajuan

proposal, identifikasi pekerjaan dan merencanakan waktu yang akan dipakai dalam merehab rumah mereka. Untuk masyarakat di wilayah Kelurahan Batu Ceper cenderung lebih baik dengan karakteristik perkotaan mereka dibandingkan dengan Kelurahan Kedaung Baru dengan karakteristik masyarakat desanya.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehab rumah tidak layak huni di Kota Tangerang pada saat tahap pelaksanaan antara Kelurahan Kedaung baru dan Kelurahan Batu Ceper terlihat bahwa Kelurahan Kedaung Baru lebih aktif dalam berpartisipasi dibandingkan dengan Kelurahan Batu Ceper. Hampir semua masyarakat di Kelurahan Kedaung Baru berpartisipasi dalam bentuk pemberian material ataupun penambahan uang, bahkan di Kelurahan kedaung baru tidak terdapat partisipasi warganya dalam bentuk tenaga. Hal ini karena masyarakat Kelurahan Batu Ceper semua tidak memiliki keahlian dalam hal memperbaiki rumah atau bangunan sehingga mereka berparisipasi dalam bentuk lain seperti menambah material dan biaya perbaikan.

Karakteristik masyarakat yang kuat mempengaruhi partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dalam kegiatan rehab rumah tidak layak huni di Kelurahan Kedaung Baru dan Kelurahan Batu Ceper Kota Tangerang adalah status pernikahan dan pekerjaan. Faktor yang dominan mempengaruhi pada tahap ini adalah masyarakat dengan status menikah dan pekerjaan masyarakat sebagai buruh

Karakteristik masyarakat yang kuat mempengaruhi partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan dalam kegiatan rehab rumah tidak layak huni di Kelurahan Kedaung Baru dan Kelurahan Batu Ceper Kota Tangerang adalah usia, jumlah penghuni dan lama tinggal. Faktor yang dominan mempengaruhi pada tahap ini adalah masyarakat dengan usia produktif antara 31-50 tahun, sebuah rumah dengan jumlah penghuni 5-6 orang, dan orang yang sudah tinggal lebih dari 15 tahun

Adanya peran dari faktor eksternal yang tidak kami teliti seharusnya juga mempengaruhi partisipasi yang terjadi pada kegiatan rehab rumah tidak layak huni di Kota Tangerang karena dari beberapa responden dan narasumber

menyebutkan bahwa peran BKM sebagai pengorganisasi dan pendorong proses partisipasi warga cukup dominan di wilayah penelitian kami ini.

5.2 Rekomendasi Untuk Masyarakat dan *Stakeholder*

a. Masyarakat

Dalam tahap perencanaan, masyarakat sebaiknya lebih berani untuk menyuarkan prioritas pekerjaan rehab yang sesuai kebutuhannya. Pada pertemuan baik yang sifatnya formal (rapat RT/RW atau sosialisasi) atau non formal (diskusi lapangan) masyarakat tidak perlu takut dan khawatir dengan pendapat atau usulan pekerjaan mereka tidak diterima oleh BKM ataupun pemerintah daerah karena hal itu adalah hak masyarakat dalam proses pembangunan dengan pendekatan partisipasi masyarakat.

Dalam tahap pelaksanaan, masyarakat sebaiknya juga memberikan bantuan berupa keterlibatan tenaga. Bentuk partisipasi inilah yang paling jarang dilakukan, meskipun sebagian besar masyarakat tidak memiliki keahlian sebagai tukang namun misalnya dalam hal membongkar rumah seharusnya tidak diperlukan keahlian khusus sehingga disitulah masyarakat bisa ikut terlibat baik secara perorangan maupun bergotong royong dengan tetangga.

b. *Stakeholder*

Dalam tahap perencanaan, *stakeholder* baik BKM dan pemerintah daerah sebaiknya lebih memberikan informasi secara detail mengenai kegiatan rehab RTLH kepada masyarakat baik calon penerima manfaat atau yang tidak mendapat bantuan. Memberi informasi secara lengkap akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong masyarakat yang tidak mendapat bantuan untuk ikut serta terlibat berpartisipasi membantu tetangga yang mendapatkan bantuan rehab rumah.

Dalam tahap pelaksanaan, karena tingkat partisipasi masyarakat disini sudah tinggi maka *stakeholder* baik BKM dan pemerintah daerah sebaiknya mulai memberikan kontrol penuh kepada masyarakat. Fungsi dari BKM dan pemerintah dapat bergeser dari pendamping menjadi pengawas dengan sebelumnya

memberikan pelatihan bagi tokoh – tokoh masyarakat mengenai tugas dan fungsi dari pendamping yang akan dibebankan kepada masyarakat itu sendiri.

5.3 Rekomendasi Untuk Penelitian Lanjutan

Terhadap pengembangan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah kami memandang perlunya penelitian terhadap faktor eksternal yang juga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehab rumah tidak layak huni di Kota Tangerang. Gambaran mengenai bagaimana peran *stakeholder* seperti BKM dan pemerintah daerah dalam mendorong keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi di setiap tahapan kegiatan pembangunan diharapkan dapat diketahui lebih jauh dan jelas.